



Kota Yogyakarta Raih Kota Layak Anak Kategori Utama Tiga Kali Berturut-turut

Kota Yogyakarta kembali mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) Kategori Utama pada 2023. Penghargaan KLA Kategori Utama ini merupakan yang ketiga kali berturut-turut sejak 2021.

Penghargaan tersebut melengkapi anugerah lain untuk Kota Yogyakarta dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai daerah yang berkomitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, berbasis Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Pelaporan Perlindungan Anak (SIMPEL PA). Penghargaan dari KPAI ini merupakan yang keempat kali secara berturut-turut. Tidak hanya itu, KPAID Kota Yogyakarta sebagai mitra Pemkot Yogyakarta, tahun ini juga mendapatkan juara 1 nasional. Tahun sebelumnya, KPAID Kota Yogyakarta mendapatkan juara 2 nasional.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Edy Muhammad mengatakan apresiasi ini menjadi bagian dari tolok ukur implementasi program KLA di Kota Yogyakarta, sejalan dengan indikator yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, penghargaan ini pada dasarnya bukan tujuan utama. Semua ini lebih kepada upaya Pemkot Yogyakarta untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan anak. Prestasi Kota Yogyakarta sebagai KLA Kategori Utama tidak lepas dari peran, kolaborasi, dan sinergi para pemangku kepentingan.

"Selain Pemkot sampai tingkat kelurahan, mulai dari media massa, pengusaha, sampai forum anak, di Yogyakarta memiliki program pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kami juga melibatkan akademisi sampai masyarakat agar bergerak bersama di mana pun anak berada," kata Edy, Senin (24/7/2023).

Pada prinsipnya, semua sektor perlu mendukung tumbuh kembang anak. Beberapa patokannya lingkungan sekitar diharapkan membentuk anak menjadi pribadi yang lebih baik, terpenuhi hak-haknya, tidak membeda-bedakan, adanya perlindungan untuk anak, dan tidak kalah penting berupa partisipasi anak dalam berbagai forum serta pembentukan kebijakan. Suara anak

perlu didengar sebagai pertimbangan pembuatan program atau kebijakan. Artinya selama 24 jam anak berkegiatan, semua unsurnya perlu saling mendukung. Seperti saat anak berada di keluarga, sekolah, dan luar sekolah. Bahkan saat anak menghadapi masalah hukum, lingkungan Polsek perlu menjamin hak-hak anak terpenuhi. Program Polsek Ramah Anak menjadi salah satu inovasi Pemkot Yogyakarta.

"Kami membentuk forum Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam rangka kita memberikan pemenuhan hak dan perlindungan tidak hanya pada anak-anak saja, tetapi juga pada korban dan bahkan pelaku," katanya. Sebagai contoh ada anak yang berhadapan dengan hukum, dan membuat mereka ditahan, maka kepolisian dengan dinas terkait akan menjamin akses pendidikan anak dan lainnya tetap terpenuhi. Anak tetap bisa mengikuti ujian sekolah dan sebagainya.

Kategori Paripurna

Di samping Polsek Ramah Anak, ada pula penguatan program lain. Salah satunya memberikan SOP di semua pihak yang berkaitan dengan anak. Misalnya Dinas Pendidikan dan Olahraga, saat ada anak yang berhadapan dengan hukum, maka ada SOP yang jelas untuk menangannya. Ini berlaku di berbagai dinas dan kelompok masyarakat lain. Penguatan juga terkait layanan aduan online yang terintegrasi dalam aplikasi Jogja Smart Service atau JSS. Semua perpaduan ini membawa Kota Yogyakarta meraih KLA kategori Utama dengan nilai yang tinggi tahun 2023 ini. Dari sisi penghargaan, Pemkot Yogyakarta menargetkan pada tahun berikutnya untuk mendapatkan KLA Kategori Paripurna.

Pemerhati anak sekaligus anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dian Sasmita mengatakan, Jogja memang layak mendapat penghargaan KLA tersebut.

"Predikat Kota Layak Anak harus menjadi motivasi untuk pemerintah daerah agar lebih serius memenuhi hak anak dan memberikan perlindungan kepada anak agar terbebas dari kekerasan dan eksploitasi," kata Dian.

Menurut dia, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan respons yang terintegrasi pada kasus kasus anak sehingga tidak ada anak yang merasa terabaikan haknya. (BC)



Pejabat (Pj) Walikota Yogyakarta, Singgih Raharjo saat menerima penghargaan KLA Kategori Utama.

Ini Bukti Jogja Komitmen Penuhi Hak Anak

Kota Yogyakarta kembali mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Sebagai Kota Layak Anak, Pemkot berkomitmen melakukan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dengan lebih baik.

Pejabat (Pj) Walikota Yogyakarta, Singgih Raharjo menyampaikan penghargaan tersebut diterima atas upaya Pemkot Yogyakarta dalam melakukan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak selama ini. "Penghargaan tersebut bukan target kami. Target kami pada perlindungan dan pemenuhan hak anak yang utuh," katanya saat ditemui di ruangannya, Selasa (25/7/2023).

Menurut Singgih dalam mewujudkan Kota Yogyakarta layak anak, selama ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Yogyakarta bersinergi dalam berbagai program kegiatan. Menurut Singgih komitmen untuk dapat memenuhi hak anak dan melakukan

perlindungan anak dimiliki setiap OPD di lingkup Pemkot Yogyakarta.

Untuk mendapatkan penghargaan tersebut, indikator Kota Layak Anak telah dipenuhi oleh Pemkot Yogyakarta yang terdiri dari pemenuhan hak anak dalam klaster hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus.

Menurut Singgih indikator itu selama ini telah berupaya untuk dicapai antara lain Pemkot telah berupaya menurunkan angka stunting, penurunan usia perkawinan, dan menyediakan kawasan tanpa rokok. Kemudian ada pula kerjasama dalam penanganan dan pendampingan khusus terhadap anak berhadapan hukum (ABH). Singgih pun berharap upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dapat terus ditingkatkan Pemkot Yogyakarta sehingga Kota Yogyakarta nantinya dapat meraih Kota Layak Anak Paripurna. (BC)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005